



**GELIAT POLITIK DI DAERAH:
Perjuangan Masyarakat Kepulauan Bangka dan Belitung Untuk
Membentuk Provinsi Terpisah Dari Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 1956-2002**

**Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

**Eri Dwi Wahyuni
NIM 13030113120005**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI

Dengan ini saya, Eri Dwi Wahyuni menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain; baik yang dipublikasikan maupun tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama penulis secara benar dan semua isi karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang,
Penulis,

Eri Dwi Wahyuni
NIM 13030113120005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

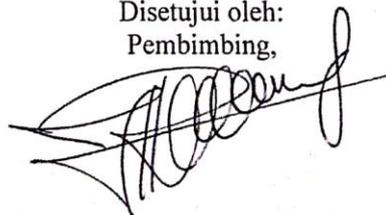
“If you don't work hard, there won't be good result.”

Jhope BTS

Dipersembahkan untuk:

Bapak, Mama,
Mbak Eka, Era

Disetujui oleh:
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haryono Rinardi', written over a horizontal line.

Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.
NIP 19670311 199303 1 004

Skripsi dengan judul “GELIAT POLITIK DI DAERAH: Perjuangan Masyarakat Kepulauan Bangka dan Belitung Untuk Membentuk Provinsi Terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1956-2002”, yang disusun oleh Eri Dwi Wahyuni (NIM 13030113120005) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada Hari Rabu, 19 Desember 2018.

Ketua,



Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si.
NIP 19610605 198603 2 001

Anggota I,



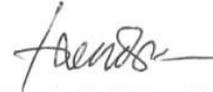
Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.
NIP 19670311 199303 1 004

Anggota II,



Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum.
NIP 19670528 199103 2 001

Anggota III,



Mahendra Pudji Utama, S.S., M.Hum.
NIP 19710224 199903 1 001



Mengesahkan,
Dekan

Dr. Redyanto Noor, M.Hum.
NIP 19590307 198603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “GELIAT POLITIK DI DAERAH: Perjuangan Masyarakat Kepulauan Bangka dan Belitung Untuk Membentuk Provinsi Terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1956-2002”, yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana program strata 1 dalam Sejarah Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk, baik berupa materi maupun spiritual kepada yang terhormat:

1. Dr. Redyanto Noor, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
2. Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
3. Dr. Haryono Rinardi, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan dan selalu meluangkan waktu selama bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Dra. Sri Indrahti, M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis.
5. Terimakasih kepada Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si., Dr. Haryono Rinardi, M.Hum., Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum., dan Mahendra Pudji Utama, S.S., M.Hum., selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.
6. Terimakasih penulis ucapkan kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama menjadi mahasiswa. Kepada segenap staf administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, terimakasih telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.

7. Ir. H. Darmansyah Husein selaku Konsultan Perencanaan Wilayah dan Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis terhadap penulisan skripsi ini.
8. H. Rustam Effendi, B.Sc., selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2013-2017 yang telah membantu dan memberikan banyak informasi kepada penulis terhadap penulisan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih yang tidak terhingga untuk kedua orangtua penulis, Bapak Suharno dan Mama Endang Prastuti yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian dan kesabaran demi tercapainya cita-cita penulis selama ini. Tak lupa juga kepada saudara-saudara penulis; Mbak Eka, Era, Mbak Danti, Tante, Paman, Kakek dan Nenek. Terimakasih atas doa, kasih sayang kalian dan dukungannya kepada penulis. I love you so much!
10. Kepada sahabat-sahabatku tercinta di Belitung; Sri Wulandari, Poppy Oktari, Putri Apsari, Sitroneli, Wilda Ferosa, Henny Winanny, Diana Retnowati, yang tetap mendukung dan memberikan semangat kepada penulis walaupun terpisah oleh jarak yang jauh.
11. Kepada sahabat-sahabatku yang ada di Semarang; Yusrina Zata Dini, Helga Floria, Zada Claudia, Swaibatul Aslamiah, Tri Putri Wulandari, Fanada Sholihah, Elita Rahmawati, Jennifer Maya Sianturi, Ilha Hiatussa'adah, Annisa Citra Muslimah, Feni Annugraeni, Mega Ari Suci S., Reni Wijayanti, Wida Cahyati, Muzhamil Khusnul C., Suci Fitriatul M., Muhammad Sibghatullah, dan Farid Fardon T., terimakasih untuk bantuan, dukungan dan kenangan indah yang diberikan kepada penulis selama berada di Semarang.
12. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas segala dukungan dan bantuan selama masa perkuliahan.

Semarang, 3 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KONDISI WILAYAH BANGKA BELITUNG	20
A. Latar Belakang Politik Pemerintahan	20
B. Keadaan Daerah	22
1. Kondisi Geografis	22
2. Kondisi Demografis	24
3. Wilayah Administratif	25
4. Kondisi Ekonomi	27
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	32
b. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	33
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi	34
d. Pendapatan Perkapita Bangka Belitung	37
C. Keadaan Sosial Budaya Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung	38
1. Suku Bangsa	38
2. Bahasa	39
3. Adat Istiadat	40

BAB III	PERJUANGAN BANGKA BELITUNG MENJADI PROVINSI TAHUN 1956-1998	43
	A. <i>Background</i> Historis Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung	43
	1. Faktor Bangka Belitung Menjadi Provinsi	43
	2. Silent Operational Tahun 1956-1966	47
	B. Jejak Perjuangan Tahun 1966-1998	50
	a. Keterlibatan Ikatan Mahasiswa Bangka dan Belitung	50
	b. Perjuangan Melalui Dukungan Lembaga Legislatif Tiga Daerah	53
	c. Ikrar Bersama dan Terbentuknya Presidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung	57
	d. Dukungan Dari Elemen Masyarakat	65
	e. Tanggapan Pemerintah Sumatera Selatan terhadap Pembentukan Provinsi Bangka Belitung	67
	f. Tanggapan Pemerintah Pusat terhadap Pembentukan Provinsi Bangka Belitung	69
BAB IV	PEMBENTUKAN PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 1999-2002	78
	A. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia (Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999)	78
	1. Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah	78
	2. Dinamika Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999	79
	B. Persiapan Pembentukan Bangka Belitung Menjadi Provinsi	81
	1. Konsolidasi Elite Daerah	82
	a. Dewan Pemuda Bangka Belitung dan Komite Pembentukan Provinsi Bangka Belitung (KPPBB)	82
	b. Keterlibatan KPPBB Dalam Pembentukan Provinsi Bangka Belitung	87
	c. Terbentuknya Presidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung dan Kesepakatan Bersama Pembentukan Provinsi Bangka Belitung	93
	2. Langkah-Langkah Strategis	95
	a. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja)	95
	b. Terbitnya RUU Pembentukan Provinsi Bangka Belitung	97
	c. Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan	100
	d. Konsolidasi dan Lobi-Lobi Politik	101
	e. Terbentuknya Panitia Khusus RUU Pembentukan Provinsi Bangka Belitung	108

f. Tahap Penentuan	113
C. Bangka Belitung Menjadi Provinsi	117
D. Pembentukan Struktur Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	120
BAB V SIMPULAN	125
DAFTAR PUSTAKA	128
DAFTAR INFORMAN	134
LAMPIRAN	135

DAFTAR SINGKATAN

ADO	: Alokasi Devisa Otomatis
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia
Bamus	: Badan Musyawarah
BKN	: Badan Kepegawain Negara
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPD	: Badan Perwakilan Desa
BPU	: Badan Pimpinan Umum
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
Cagub	: Calon Gubernur
Cawagub	: Calon wakil Gubernur
DAS	: Daerah Aliran Sungai
Dati	: Daerah Tingkat
DAU	: Dana Alokasi Umum
Depdagri	: Departemen Dalam Negeri
DPOD	: Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DPRD-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
FABERI	: Federasi Bangka Belitung dan Riau
Golkar	: Golongan Karya
HAM	: Hak Asasi Manusia
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
IKMB	: Ikatan Keluarga Masyarakat Belitung
IKPB	: Ikatan Keluarga Pelajar Belitung
ISBA	: Ikatan Siswa Bangka
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam
Kanwil	: Kantor Wilayah

KASI	: Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Keppres	: Keputusan Presiden
Kg	: Kilogram
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KNPI	: Komite Nasional Pemuda Indonesia
KPPBB	: Komite Perjuangan Provinsi Bangka Belitung
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LSM	: Lembaga Sosial Masyarakat
Mendagri & Otda	: Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
MPR	: Majelis Perwakilan Rakyat
Muspida	: Musyawarah Pimpinan Daerah
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NU	: Nahdatul Ulama
Ormas	: Organisasi Masyarakat
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PAN	: Partai Amanat Nasional
Panja	: Panitia Kerja
Pansus	: Panitia Khusus
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PBB	: Partai Bulan dan Bintang
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDRB	: Produk Doomestik Regional Bruto
Perda	: Peraturan Daerah
PELTIM	: Unit Peleburan Timah Mentok
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perpu	: Peraturan Perundang-undangan
PKB	: Partai Kesatuan Bangsa
PMI	: Partai Muslimin Indonesia
PN	: Perusahaan Negara

PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Pokja	: Kelompok Kerja
PP	: Peraturan Pemerintah
PPPBB	: Presidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PSII	: Partai Sjarikat Islam Indonesia
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
RUU	: Rancangan Undang Undang
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
SIJORI	: Singapura-Johor-Riau
SK	: Surat Keputusan
TI	: Tambang Inkonvensional
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
UU	: Undang Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
UPT	: Unit Penambangan Timah
VOC	: Vereenigde Oostindische Compagnie

DAFTAR ISTILAH

<i>Agreement</i>	: persetujuan, permufakatan, perjanjian.
Aklamasi	: pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usul tanpa melalui pemungutan suara.
Akomodasi	: sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan.
Akumulasi	: pengumpulan; penimbunan; penghimpunan.
<i>Caretaker</i>	: pejabat sementara.
<i>Check point</i>	: titik pemeriksaan suatu tempat atau wilayah.
<i>De facto</i>	: bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lainnya yang berdasarkan pada kenyataan yang menyatakan bahwa negara tersebut sudah memenuhi syarat syarat terbentuknya negara seperti adanya wilayah, adanya rakyat dan adanya pemerintahan yang berdaulat.
Dekade	: masa sepuluh tahun.
<i>Dreger</i>	: kapal keruk.
Desentralisasi	: sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.
Devisa	: alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri.
Dulang	: sebuah nampan sebesar nampah berbentuk bulat dari alumunium atau kuningan.
Formatur	: Orang-orang yang ditugasi membentuk suatu badan kabinet, pengurus, organisasi, dan sebagainya.
<i>Feasibility Study</i>	: studi kelayakan.
<i>Holding company</i>	: perusahaan induk, adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan.
Ikrar	: Sebuah perjanjian (dengan sumpah).
<i>Illegal fishing</i>	: Penangkapan ikan secara ilegal.

Implikasi	: keterlibatan atau keadaan terlibat.
Intensif	: Suatu usaha yang sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal.
Intervensi	: campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).
Karesidenan	: sebuah pembagian administratif dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda (Indonesia) hingga tahun 1950-an.
Kawedanan	: wilayah administrasi pemerintahan yang berada di bawah kabupaten dan di atas kecamatan yang berlaku pada masa Hindia Belanda dan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia yang dipakai di beberapa provinsi.
Kondusif	: suatu keadaan tenang dan mendukung pada hasil yang diinginkan.
Konsolidasi	: perbuatan (hal dan sebagainya) memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dan sebagainya).
Koordinasi	: perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur.
Kotamadya	: sebuah wilayah yang dikepalai oleh seorang wali kota (menyerupai kota).
Legitimasi	: keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud.
Legiun	: pasukan bala tentara terdiri atas 5.000— 6.000 personel.
<i>Lingua franca</i>	: sebuah istilah linguistik yang artinya adalah "bahasa pengantar" atau "bahasa pergaulan" di suatu tempat di mana terdapat penutur bahasa yang berbeda-beda.
<i>Lobby</i>	: Sebuah bentuk pendekatan secara personal atau kelompok guna mempengaruhi sesuatu yang ingin dilakukan.

Marjinalisasi	: proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok dengan lembaga sosial utama, seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya.
Memorandum	: nota atau surat peringatan tidak resmi.
Muang Jong	: sebuah upacara ritual Suku Sawang (masyarakat Belitung) yang digelar saat menjelang musim <i>Tenggare' pute</i> (Tenggara), biasanya sekitar bulan Juli hingga September, ketika angin dan ombak laut sangat kuat dan ganas.
Nganggung	: suatu tradisi turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Bangka yaitu membawa makanan di dalam dulang atau talam yang ditutup tudung saji kemudian dibawa ke Masjid, Surau atau Balai desa untuk dimakan bersama setelah pelaksanaan ritual agama.
Otonomi daerah	: kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
<i>Over spill area</i>	: daerah penyangga.
Piper Nigrum	: tanaman lada.
Presidium	: pimpinan tertinggi suatu badan yang terdiri atas beberapa orang yang berkedudukan sama.
<i>Profit oriented</i>	: berorientasi pada keuntungan.
Reformasi	: perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.
<i>Research</i>	: penelitian.
<i>Resume</i>	: ringkasan.
Sentralistis	: berorientasi pada pusat.
<i>Social oriented</i>	: berorientasi pada sosial.
<i>Statement</i>	: pernyataan.
Suku Sawang	: suatu komunitas masyarakat adat yang mendiami wilayah kabupaten Belitung. Suku Sawang ini adalah penduduk asli pulau kabupaten Belitung, yang tersebar

di Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur provinsi Bangka Belitung. Masyarakat suku Sawang dahulunya hidup di laut, hidup di perahu beratap selama berbulan-bulan secara nomaden mencari sumber kehidupan di laut.

- Survei : penyelidikan, peninjauan.
Veteran : bekas prajurit (pasukan perang, pejuang).

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel:	
2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang Tahun 1980-2000.	25
2.2. Nama-nama kecamatan dan Luas Wilayah Kecamatan dari Kabupaten Bangka.	26
2.3. Nama-nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kecamatan dari Kabupaten Belitung.	27
2.4. PDRB Bangka & Belitung Tahun 1996-2000 (rupiah).	34
2.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Bangka dan Belitung Tahun 1996-2000.	35
2.6. Pendapatan Perkapita Bangka dan Belitung Tahun 1996-2000.	37

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran:	
A. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Bangka No: 10/KP/DPRDGR/1967.	135
B. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Pangkalpinang No: 16/SK/GR/1967.	137
C. Ikrar Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kotamadya Pangkalpinang, di Tanjungpandan tanggal 29 September 1968.	140
D. <i>Agreement</i> Bersama Antar Utusan Kabupaten Bangka, Kotamadya Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung, di Tanjungpandan tanggal 29 September 1968.	141
E. Nota dari Perutusan dari Kabupaten Belitung, di Tanjungpandan 28 September 1968.	142
F. Surat Keputusan Musyawarah Besar Antar Utusan Kabupaten Bangka, Kotamadya Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung yang kedua di Pangkalpinang, tanggal 28 Januari 1969.	143
G. Surat Keputusan Musyawarah Bersama Antar Utusan Kabupaten Bangka, Kotamadya Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung di Pangkalpinang, 29 Januari 1969.	145
H. Surat Keputusan Musyawarah Gabungan Antar Utusan Kabupaten Bangka, Kotamadya Pangkalpinang dan Kabupaten Belitung tanggal 30 Januari 1969.	146
I. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Bangka No. 5/KP/DPRDGR/1969.	148

J.	Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Pangkalpinang tentang Pembentukan Presidium Perjuangan Provinsi Bangka Belitung No: 8/SK/DPRD/69, tanggal 31 Maret 1969.	150
K.	Piagam Deklarasi Dewan Pemuda Bangka Belitung 18 Juni 1999.	152
L.	Memorandum DPRD Kota Pangkalpinang Tentang Perjuangan Kepulauan Bangka Belitung Menjadi Propinsi Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 1999 tanggal 17 Desember 1999.	153
M.	Memorandum DPRD Kabupaten Bangka Tentang Perjuangan Pembentukan Propinsi Bangka Belitung Nomor 163 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999.	154
N.	Memorandum DPRD Kabupaten Belitung Tentang Rencana Pembentukan Propinsi Bangka Belitung Nomor 208 Tahun 1999 tanggal 13 Januari 2000.	155
O.	Deklarasi Pembentukan Propinsi Bangka Belitung, Pangkalpinang tanggal 17 Januari 2000.	157
P.	Kesepakatan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung, 24 Januari 2000.	159
Q.	Rekomendasi Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung Nomor 03 Tahun 2000 tanggal 13 Januari 2000.	160
R.	Surat Pernyataan Bersama Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung tanggal 17 April 2000.	161
S.	Foto	163

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “GELIAT POLITIK DI DAERAH: Perjuangan Masyarakat Kepulauan Bangka dan Belitung Untuk Membentuk Provinsi Terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1956-2002” berisi kajian tentang rangkaian perjuangan masyarakat Bangka Belitung untuk menjadi provinsi sendiri terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada skripsi ini terdapat dua permasalahan yaitu hubungan antara dinamika politik otonomi daerah dan proses pembentukan Provinsi Bangka Belitung serta hubungan antara kondisi sosial-budaya masyarakat Bangka-Belitung dan perjuangannya untuk menjadikan wilayahnya sebagai provinsi tersendiri terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengkaji permasalahan tersebut. Terdapat empat tahapan dalam metode sejarah, yakni *heuristik*, yaitu pengumpulan sumber, *kritik sumber* yaitu mengkritisi sumber yang telah dikumpulkan untuk mengetahui otentisitas dan kredibilitas sumber, *interpretasi* yaitu mengaitkan antara fakta satu dengan yang lainnya, dan *historiografi* adalah penulisan peristiwa sejarah. Adapun pendekatan digunakan adalah pendekatan sejarah politik dan ekonomi.

Perjuangan masyarakat Bangka Belitung untuk menuntut menjadi provinsi tersendiri sudah berlangsung sejak tahun 1956. Keinginan untuk terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh adanya ikatan historis dan kultural yang menjadi faktor utama. Secara kultural masyarakat Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah merasa menjadi bagian dari masyarakat Sumatera Selatan “daratan”. Mereka memiliki nilai dan tradisinya sendiri, yang berakar dari bangsa Melayu.

Perjuangannya hampir berhasil pada masa Orde Baru, tetapi gagal karena tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat. Perjuangan untuk memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan momen yang tepat pada masa reformasi, dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau disebut juga dengan UU otonomi daerah.

ABSTRACT

This thesis entitled ""STRETCH OF POLITICS IN THE AREA: The Struggle of the Communities of the Bangka and Belitung Islands to Form a Separate Province from the Province of South Sumatra in 1956-2002" contains a study of the series of struggles of the people of Bangka Belitung to become their own province separate from the Province of South Sumatra. In this thesis there are two problems, namely the relationship between the political dynamics of regional autonomy and the process of forming the Bangka Belitung Province and the relationship between the socio-cultural conditions of the Bangka-Belitung community and its struggle to make its territory a separate province separate from the South Sumatra Province.

This research uses a critical historical method to review these problems. There are four stages in the critical historical method, namely heuristics, namely the collection of sources, source criticism, namely criticizing the sources that have been collected to know the authenticity and credibility of the source, the interpretation of linking facts with one another, and historiography is the writing of historical events. The approach used is an approach to political and economic history.

The struggle of the Bangka Belitung community to demand a separate province has been going on since 1956. The desire to be separated from the Province of South Sumatra is caused by the existence of historical and cultural ties which are the main factors. Culturally the people of the Bangka Belitung Islands have never felt part of the community of South Sumatra "on land". They have their own values and traditions, which are rooted in the Malay nation.

His struggle was almost successful in the New Order era, but failed because it was not approved by the Central Government. The struggle to separate from the South Sumatra Province got the right moment in the reform era, with the birth of Law No. 22 of 1999 concerning Regional Government or also called the Regional Autonomy Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Pemekaran wilayah merupakan bagian dari studi desentralisasi dan otonomi daerah yang berkaitan dengan keinginan sekelompok masyarakat untuk pemisahan daerah secara mandiri dari otoritas wilayah administrasinya.¹ Pada dasarnya pemekaran wilayah dapat menjadi solusi bagi pemerintah jika hasilnya dapat mendorong proses pembangunan lebih efisien. Hal itu menjadikan otonomi daerah sebagai dasar untuk melakukan pemekaran wilayah sehingga masyarakat diberikan kewenangan untuk mampu mengolah Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM,) aktivitas perekonomian dan pelayanan masyarakat yang efektif.²

Dengan dasar pemekaran itu muncul kehendak masyarakat untuk mendirikan provinsi atau kabupaten baru yang terpisah dari provinsi dan atau kabupaten lama. Fenomena itu semakin bergeliat pasca reformasi digulirkan pada 1998, keluar Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang ditandai dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dengan semangat otonomi daerah ini akhirnya muncul paradigma pemekaran wilayah yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, memudahkan

¹Laila Khalid Alfirdaus dan Fitri Zakiah, “Akar Pemekaran dan Prospek Pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung” dipresentasikan dalam Seminar Internasional VII “Dinamika Politik Lokal: Ruang Untuk Memperjuangkan Kepentingan Politik”, diselenggarakan oleh Percik-Ford Foundation di Salatiga 11-14 Juli 2006 (<https://www.academia.edu/> diunduh pada 4 September 2017).

²Kadir Lumbessy, “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan Perekonomian Wilayah Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Buru, Tesis, Sekolah Pasca Sarjana Insitut Pertanian Bogor, 2005 (<http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/>, dikunjungi pada 14 November 2017).

pelayanan publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan masyarakat. Ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru dibuka lebar oleh kebijakan pemekaran daerah berdasar UU itu.

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah dari prinsip efisiensi dan pertumbuhan menjadi prinsip kemandirian dan keadilan. Dalam kondisi orientasi pembangunan yang demikian, maka orientasi penyelenggaraan pembangunan bergeser ke arah desentralisasi. Salah satu implikasi dari perubahan paradigma penyelenggaraan pembangunan tersebut adalah timbulnya fenomena pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah pada otonomi daerah seakan punya daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan.³

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil.⁴ Dalam konteks Indonesia, konsep pemekaran wilayah disebabkan dua faktor yaitu faktor politik dan faktor ekonomi. Faktor politik yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya, sehingga inisiatif pemekaran dianggap sebagai solusi untuk mengatasi tidak terakomodasinya kepentingan-kepentingan politik. Faktor ekonomi yaitu adanya ketidakseimbangan pemerataan distribusi hasil sumber daya ekonomi. Pemekaran wilayah sebagai jalan keluar

³Andik Wahyun Muqoyyidin, “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013 (<https://media.neliti.com/media/publications/107897-ID>, dikunjungi pada 27 Februari 2018).

⁴Ahmad Muzawwir, “Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000”, *Tesis*, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008, hlm. 53 (<http://repository.usu.ac.id/>, dikunjungi pada 2 Februari 2018.)

yang efektif jika masyarakat mampu mengolah sumber daya ekonomi dan memastikan sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kondisi itu agak berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Keinginan untuk menjadi provinsi sendiri, terpisah dari Provinsi Sumatra Selatan bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik, tetapi terutama disebabkan nilai historis. Terdapat pandangan dalam masyarakat Bangka Belitung bahwa mereka telah terikat oleh sejarah dan budayanya sendiri sejak awal dan perlu ruang untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut. Dirunut dari alur historis, sejak zaman Belanda daerah itu telah terbentuk sebagai residen tersendiri, bernama *Resindetil Bangka Belitung Onderhoregenheden*. Kondisi itu berlanjut hingga masa pendudukan Jepang, secara administratif Bangka-Belitung disebut dengan Bangka Beliton Ginseibu.⁵ Adapun pada masa kemerdekaan, terbentuk Dewan Bangka Sementara hasil bentukan Belanda, yang selanjutnya menjadi negara bagian tersendiri semasa Republik Indonesia Serikat (RIS), bernama Federasi Bangka Belitung dan Riau (FABERI).⁶ Setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada era 1950-an, oleh pemerintahan Soekarno, Bangka Belitung diserahkan kepada Provinsi Sumatra Selatan.

Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan, merupakan kesatuan gugusan pulau yang dipisahkan oleh teluk dan laut. Bangka Belitung mempunyai nilai budaya yang sama dan keterikatan pada Suku Melayu. Kepulauan Bangka Belitung terletak di wilayah yang cukup strategis, yaitu berbatasan dengan Selat Bangka di sebelah barat. Bangka Belitung juga berbatasan dengan daratan timur Sumatera Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna. Adanya faktor geografis yaitu letaknya

⁵Hikmat Ishak, *Kepulauan Bangka Belitung: Semangat dan Pesona Provinsi Timah dan Lada*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2000), hlm. 4.

⁶Husnial Husin Abdullah, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI Di Bangka dan Belitung*, (Jakarta:PT. Karya Unipress, 1983).

yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan, membuat masyarakat Bangka Belitung mengklaim bahwa ikatan historis dan kultural di antara mereka menjadi faktor utama tuntutan untuk membentuk provinsi tersendiri.

Masyarakat Bangka Belitung sejak awal merasa tidak puas dengan keputusan pemerintah untuk menetapkan wilayahnya bersama-sama dengan Lampung, Jambi dan Bengkulu menjadi bagian Provinsi Sumatera Selatan pada 1950-an. Dalam perkembangan Lampung, Bengkulu, dan Jambi memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dengan membentuk provinsi tersendiri pada dekade 1960. Hal itu menyebabkan masyarakat Bangka Belitung mengharapkan hal yang sama dari pemerintah. Akan tetapi, Bangka-Belitung tetap menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan sampai pada periode peralihan kekuasaan pemerintahan ke tangan Soeharto. Perjuangan Bangka Belitung untuk menjadi provinsi sendiri tetap dilanjutkan dari tahun 1966 hingga 1970. Upaya perjuangan itu pun digulirkan bahkan telah sampai pada tahap pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) pada tahun 1970. Namun pada masa itu pengajuan pemekaran tersebut belum dianggap sebagai sesuatu yang urgen oleh Pemerintah Pusat sehingga aspirasi masyarakat Bangka Belitung masih belum bisa terpenuhi hingga genap pemerintahan Soeharto.

Pada era reformasi, perjuangan Bangka Belitung untuk menjadi provinsi tidak sia-sia. Lahirnya kebijakan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dapat mendukung aspirasi dan perjuangan masyarakat Bangka Belitung untuk menjadi provinsi. Ditambah lagi, dukungan-dukungan yang mengalir dari Pemerintah pusat dan lembaga daerah bagi pembentukan provinsi tersendiri. Perjuangan Bangka Belitung menjadi provinsi dapat terealisasikan dengan disahkannya RUU Pembentukan Provinsi Bangka Belitung pada 21 November 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah propinsi ke-31 di NKRI yang terbentuk sebagai hasil pemekaran paska era reformasi. Provinsi itu resmi berdiri pada tanggal 9 Februari 2001 ditandai dengan pelantikan pejabat gubernur yang untuk sementara menjalankan pemerintahan daerah tersebut. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disahkan berdasarkan Keputusan

Presiden Republik Indonesia No. 65/M tahun 2002 tanggal 10 April 2002 pada 22 April 2002.

Berdasar kondisi di atas, skripsi ini mengkaji perihal proses pembentukan Provinsi Bangka Belitung yang diperjuangkan sejak 1956 hingga resmi menjadi Provinsi ke-31 Indonesia pada 2002. Dengan dasar itu, maka ada dua permasalahan utama yang hendak dibahas dalam skripsi ini. *Pertama*, bagaimana hubungan antara dinamika politik otonomi daerah dan proses pembentukan Provinsi Bangka Belitung. *Kedua*, bagaimana hubungan antara kondisi sosial-budaya masyarakat Bangka-Belitung dan perjuangannya untuk menjadikan wilayahnya sebagai provinsi tersendiri terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dipandu oleh pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam skripsi ini. *Pertama*, bagaimana latar belakang pemerintahan Bangka dan Belitung sebelum menuntut untuk menjadi provinsi tersendiri. *Kedua*, bagaimana proses perjuangan pembentukan provinsi Bangka Belitung pada tahun 1956-1970. *Ketiga*, faktor apa saja yang menjadi pendorong Bangka Belitung untuk membentuk provinsi tersendiri. *Keempat*, bagaimana proses perjuangan pembentukan provinsi Bangka Belitung pada tahun 1999-2002.

B. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah diperlukan agar penelitian dapat terfokus dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan metodologis.⁷ Penelitian sejarah mengenal tiga ruang lingkup, yakni temporal, spasial, dan keilmuan.

Penulisan pada skripsi ini dibatasi oleh waktu mulai tahun 1956 hingga tahun 2002. Pemilihan tahun 1956 menjadi awal penulisan skripsi ini dengan alasan bahwa tahun itu muncul keinginan masyarakat Bangka Belitung untuk memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan tahun 2002 sebagai

⁷Taufik Abdullah (Editor), *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 10.

batas akhir kajian skripsi ini sebab pada tahun itu Gubernur dan Wakil Gubernur pertama Provinsi Bangka Belitung telah dilantik.

Lingkup spasial dalam skripsi ini adalah Pulau Bangka dan Belitung yang sebelumnya berada di Provinsi Sumatera Selatan. Secara administratif pemerintahan di Pulau Bangka dan Belitung terdapat tiga daerah tingkat dua, yaitu Kabupaten Bangka di Pulau Bangka, Kabupaten Belitung di Pulau Belitung, dan Kotamadya Pangkalpinang di Pulau Bangka. Kotamadya Pangkalpinang merupakan kota lama yang telah tumbuh sejak zaman Belanda. Kota itu dulunya merupakan ibukota provinsi Kabupaten Bangka. Akan tetapi ibukota Kabupaten Bangka kemudian dipindahkan ke Sungailiat yang berstatus kecamatan pada 9 Februari 1971, 30 kilometer dari Pangkalpinang. Kabupaten Belitung merupakan pulau dengan penduduk berjumlah sekitar 200.000 orang. Ibukota kabupaten itu ialah Tanjungpandan. Ketiga daerah tingkat dua itulah yang direncanakan bergabung membentuk daerah tingkat satu “Provinsi Bangka Belitung”. Kabupaten Bangka sendiri bahkan masih dapat dibagi menjadi kabupaten Bangka Utara dan Bangka Selatan.⁸

Sementara itu, lingkup keilmuan skripsi ini adalah sejarah ketatanegaraan khususnya terkait dengan proses perwujudan Bangka Belitung menjadi provinsi. Alasan penelitian ini menggunakan lingkup keilmuan sejarah ketatanegaraan disebabkan karena proses pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang pada awalnya sentralistis kemudian mengalami perubahan ke arah sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat desentralisasi pada masa reformasi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang, permasalahan, dan batasan ruang lingkup di atas, di dalam penelitian ini dirumuskan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut.

⁸Hikmat Ishak, “Catatan”, hlm. 1.

Pertama, mengkaji aspek geografis, wilayah administrasi, ekonomi dan sosial budaya wilayah Bangka Belitung sebagai faktor rangkaian perjuangan masyarakat untuk menjadikan Bangka Belitung sebagai provinsi/Daerah Tingkat I (Dati I). *Kedua*, menganalisis rangkaian perjuangan masyarakat Bangka Belitung pada tahun 1966-1970. *Ketiga*, membahas hubungan Undang-Undang pelaksanaan otonomi daerah dengan pembentukan provinsi Bangka Belitung proses pada era reformasi dan mengkaji rangkaian perjuangan hingga terbentuknya Provinsi Bangka Belitung melalui UU No. 27 Tahun 2000.

D. Tinjauan Pustaka

Studi mengenai pembentukan provinsi Bangka Belitung dan kondisi perekonomiannya di bidang sektor timah dan lada telah dilakukan oleh para peneliti. Kajian terkait dengan pembentukan provinsi Bangka Belitung telah tertuang dalam sebuah makalah dengan judul “Akar Pemekaran dan Prospek Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” oleh Laila Kholid Alfirdaus dan Fitri Zakiah.⁹ Tulisan ini menjelaskan secara runut tentang pemekaran wilayah yang menjadi dampak dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999. Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah yang ada di Indonesia yang menggagas ingin mendirikan provinsi sendiri terlepas dari Provinsi Sumatera Selatan. Alasan ingin didirikannya provinsi Bangka Belitung merupakan tuntutan yang diajukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang timbul dari dua faktor yaitu faktor politik dan faktor ekonomi. Dalam makalah itu diungkapkan sebuah pernyataan yang menarik bahwa selain faktor ekonomi dan politik, ada faktor lain yang menyatakan kepulauan Bangka Belitung layak untuk menjadi sebuah provinsi. Faktor tersebut adalah nilai historis yang mengikat di antara mereka bahwa masyarakat Bangka

⁹Laila Khalid Alfirdaus dan Fitri Zakiah, “Akar Pemekaran dan Prospek Pembangunan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung” dipresentasikan dalam Seminar Internasional VII “Dinamika Politik Lokal: Ruang Untuk Memperjuangkan Kepentingan Politik”, diselenggarakan oleh Percik-Ford Foundation di Salatiga 11-14 Juli 2006 (<https://www.academia.edu/> diunduh pada 4 September 2017).

Belitung telah terikat oleh sejarah dan budayanya sendiri sejak awal dan oleh karena itu perlu ruang untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut.

Artikel itu membahas mengenai pemekaran wilayah di Indonesia dan Bangka Belitung sebagai tema utama untuk menganalisis faktor dan tujuan Bangka Belitung menjadi provinsi. Perbedaan artikel tersebut dengan skripsi ini adalah artikel itu menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah Bangka Belitung menjadi provinsi dan prospek pembangunan Bangka Belitung setelah terbentuk menjadi provinsi tersendiri. Sedangkan skripsi ini menjelaskan rangkaian perjuangan pembentukan provinsi Bangka Belitung sejak tahun 1956 hingga perjuangan itu berlanjut dengan lahirnya Undang-Undang (UU) otonomi daerah pada tahun 1999-2000. Lebih lanjut artikel itu menganalisis bagaimana Bangka Belitung ini dikembangkan secara ekonomi, politik, sosial dan budaya pasca terbentuknya menjadi provinsi. Dengan demikian artikel itu dapat menjadi gambaran bagi skripsi ini guna menjelaskan akar pemekaran Provinsi Bangka Belitung terkait dengan hubungan sosio-kultural.

Kedua, buku dengan judul *Politik Lokal di Indonesia* karya Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken.¹⁰ Buku ini merupakan rangkaian terakhir dari pengkajian yang menyodorkan *snapshot* tentang Indonesia setelah pengunduran diri Presiden Soeharto. Beberapa pengkajian dalam buku ini memfokuskan pada pengkajian demokratisasi dan dinamika desentralisasi serta menggambarkan masalah-masalah yang berkaitan persoalan politik.

Buku itu bermaksud menyelami pendekatan-pendekatan baru terhadap politik lokal di Indonesia pasca Soeharto, khususnya terkait dengan desentralisasi. Desentralisasi yang dijelaskan dalam buku itu sebagai suatu pengaturan kembali dari lapangan-lapangan kekuatan yang sudah ada. Dalam hal ini, topik-topik yang dikaji adalah tentang sifat dan peran elite daerah khususnya dalam bidang politik birokratis, ekonomis, dan identitas; peranan elite birokratis daerah dalam peningkatan secara besar-besaran dalam jumlah kabupaten. Buku ini memberikan

¹⁰Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV Jakarta, 2014).

pengetahuan mengenai kondisi sosial politik pasca pengunduran diri Soeharto, apalagi terkait desentralisasi dan otonomi daerah yang telah meluas dan diresmikan melalui undang undang setelahnya. Buku itu dapat menjadi gambaran tentang peristiwa di daerah yang mengalami otonomi daerah sekaligus permasalahan yang datang dari para elite birokrasi daerah, sehingga menampakkan persoalan yang tidak berjalan mulus dari terealisasinya sebuah desentralisasi.

Ketiga, sebuah artikel berjudul “Provinsi Baru di Era Otonomi Daerah dan Beberapa Permasalahannya (Studi Kasus Pemda Provinsi Bangka Belitung)” yang ada dalam buku *Protet Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan* karya Tri Ratnawati.¹¹ Artikel ini mengkaji tentang Bangka Belitung setelah terbentuk menjadi provinsi pada 9 Februari 2001. Hal itu akibat dari terealisasinya UU Otonomi Daerah pada tahun 1999. Setelahnya provinsi Bangka Belitung mengalami pemekaran sesuai UU Nomor 5 Tahun 2003 menjadi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota.

Kajian tentang permasalahan menyangkut kedua pulau tersebut hanya dari segi geografis dan ekonomi saja. Perbatasan dengan kawasan Singapura-Johor-Riau (SIJORI) yang memungkinkan rawan terjadinya usaha-usaha penyelundupan termasuk *illegal fishing*. Kemudian adanya permasalahan pengentasan kemiskinan yang berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Kaitannya dengan skripsi ini adalah dapat memberi gambaran mengenai perkembangan sosial politik, dan ekonomi setelah terbentuknya Provinsi Bangka Belitung.

Keempat, buku dengan judul *Otonomi Daerah di Era Reformasi* karya Drs. Winarna Surya Adisubrata.¹² Buku ini mengkaji tentang sejarah perkembangan

¹¹Tri Ratnawati, “Provinsi Baru di Era Otonomi Daerah dan Beberapa Permasalahannya (Studi Kasus Pemda Provinsi Bangka Belitung)” dalam Tri Ratnawati, *Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 299.

¹²Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah di Era Reformasi* (Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2002).

pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang mengalami banyak perubahan sejak dikeluarkannya UU 1945 hingga tahun 1999 tentang otonomi daerah. Selain itu terbitnya UU otonomi daerah di era reformasi merupakan pembaharuan dari kebijakan UU nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu disebabkan, UU No. 5 Tahun 1974 dianggap menutup kesempatan bagi otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri dan berdasar aspirasi dan potensi masyarakat. Hal ini membuat daerah-daerah menuntut untuk dilakukan peninjauan kembali serta pembaharuan UU Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan pelaksanaan azas desentralisasi. Hasil pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) tahun 1998 yaitu dikeluarkannya Tap MPR No. XV/MPR/1998 yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, menyebutkan bahwa daerah perlu diberikan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pusat dan daerah. Secara luas buku itu memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai potret otonomi daerah di Indonesia yang menjadi latar belakang terbentuknya Provinsi Bangka Belitung yang sudah dicanangkan tahun 1956.

Pustaka kelima yaitu artikel dalam “Jurnal konstitusi” dengan judul “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan” karya Andik Wahyun Muqoyyidin.¹³ Artikel dalam jurnal itu mengkaji mengenai maraknya pemekaran wilayah yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dari otonomi daerah yang digulirkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah pusat sampai tahun 2005, telah mengesahkan pemekaran wilayah sebanyak 148 daerah otonom baru, terdiri dari 7 provinsi, 114 kabupaten dan 27 kota (1999-2004). Dampak positif

¹³Andik, “Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan”, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013 (<https://media.neliti.com/media/publications/107897-ID>, dikunjungi pada 27 Februari 2018).

maraknya pemekaran wilayah di Indonesia adalah memberikan tempat bagi aspirasi, keberagaman dan otonomi lokal, sesuatu yang dulu diabaikan pada masa Orde Baru. Akan tetapi fenomena pemekaran wilayah secara besar-besaran membawa masalah-masalah baru. Terjadinya berbagai konflik di masa transisi pasca reformasi telah menjauhkan atau paling tidak memperlambat tujuan otonomi daerah pada umumnya dan tujuan pemekaran wilayah secara khususnya yaitu mendekatkan dan mempercepat proses pelayanan publik di masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Sebuah rekomendasi ke depan yang harus dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang bersifat umum menyangkut perencanaan kelembagaan dan pemekaran wilayah tidak perlu dihentikan tetapi harus dijalankan dengan lebih meningkatkan efisiensi organisasi pemerintah daerah dan perorganisasian daerah-daerah pemekaran itu sendiri. Artikel dalam jurnal itu memberikan gambaran tentang konsep pemekaran wilayah secara jelas dan nyata serta fakta-fakta empiris tentang pemekaran wilayah yang mengalami disfungsi penerapan dan tujuannya yang terjadi di daerah-daerah pemekaran di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Beberapa konsep yang terkait dengan masalah yang dikaji pada skripsi ini penting untuk dijelaskan. Konsep-konsep itu merupakan ide-ide dari topik permasalahan yang dirangkai menjadi satu dalam sebuah judul skripsi. Rangkaian konsep itu menjelaskan cerita sejarah yang akan ditulis pada skripsi ini. Skripsi ini, akan menganalisis usaha-usaha masyarakat Bangka Belitung dalam berbagai komponen untuk membentuk suatu provinsi sendiri, terlepas dari Provinsi Sumatera Selatan, yang dibentuk melalui persiapan, dukungan dari masyarakat maupun tokoh pemerintah sehingga usaha itu menghasilkan sebuah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Beberapa konsep yang akan digunakan dalam skripsi ini meliputi; pertama, perjuangan yang berasal dari kata juang, yaitu berusaha sekuat tenaga

tentang sesuatu dengan kesukaran dan bahaya.¹⁴ Perjuangan adalah segala usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Konsep perjuangan dalam skripsi ini merupakan usaha-usaha masyarakat Bangka Belitung untuk mencapai tujuan mereka, yaitu membentuk provinsi tersendiri terlepas dari Provinsi Sumatera Selatan. Perjuangan itu telah dilakukan sejak Bangka Belitung bergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan berstatus kabupaten pada periode 1950-an. Usaha-usaha yang dilakukan pun kembali diperjuangkan pada tahun 1966-1970 melalui lembaga daerah di Bangka Belitung. Perjuangan di tahun 1970 itu pun gagal karena pemerintahan pusat pada masa itu tidak menghendaki adanya pemekaran daerah di Indonesia. Perjuangan Bangka Belitung menjadi provinsi berlanjut ketika lahirnya masa reformasi dan UU otonomi daerah. Adanya dukungan dari lembaga daerah, pemerintah provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah pusat, maka Provinsi Bangka Belitung terwujud dengan disahkannya RUU Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 21 November 2000 dan menjadi UU No.27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Bangka Belitung.

Konsep kedua, pembentukan adalah sebuah proses atau cara guna menghasilkan sesuatu yang diinginkan.¹⁵ Konsep pembentukan dalam skripsi ini berkaitan dengan aspek pemekaran wilayah yaitu pembentukan provinsi, kabupaten/desa. Keinginan pembentukan Provinsi Bangka Belitung tidak terbentuk secara instan tetapi melalui proses perjuangan yang panjang. Adanya kekompakan dan tekad yang kuat segala cara pun ditempuh untuk membentuk Provinsi Bangka Belitung. Segala cara itu ditempuh melalui diskusi, rapat antar masyarakat maupun pemerintah daerah/pusat, pembentukan komite, pembentukan presidium, pembentukan panitia khusus dan lain sebagainya. Hal itu dilakukan agar proses pembentukan provinsi Bangka Belitung dapat direstui oleh

¹⁴“Kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online)”, (<https://kbbi.web.id/juang>, dikunjungi pada 25 September 2018).

¹⁵“Kamus KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online)”, (<https://kbbi.kata.web.id/pembentukan/>, dikunjungi pada 25 September 2018).

pemerintah pusat, berjalan sesuai aturan hukum yang ada dan direalisasikan melalui undang-undang.

Ketiga, konsep mengenai provinsi, yaitu suatu satuan teritorial dalam sebuah negara. Provinsi biasanya dijadikan nama wilayah administratif pemerintahan di bawah negara atau negara bagian. Provinsi merupakan satuan wilayah yang dikepalai oleh seorang gubernur. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 amendemen kedua, pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 1, dinyatakan bahwa, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang." Hal tersebut menyatakan bahwa provinsi merupakan tingkat pertama dari pembagian wilayah di Indonesia. Setiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Gubernur dan anggota DPRD dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun.

Keempat, Bangka Belitung sebelum menjadi provinsi tersendiri adalah dua kabupaten yang bergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan UU No.4 Tahun 1956. Bangka Belitung terdiri dari gugusan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil. Masyarakat Bangka Belitung telah menuntut untuk menjadi provinsi tersendiri sejak tahun 1956 dan berlanjut hingga tahun 1970. Akan tetapi tuntutan tersebut belum terkabulkan oleh pemerintah. Kesempatan untuk mewujudkan kembali pembentukan provinsi Bangka Belitung pada masa reformasi. Akhirnya, Bangka Belitung resmi menjadi provinsi ke-31 di Indonesia yang terbentuk pada 21 November 2000.

Konsep otonomi daerah telah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai Undang Undang di Indonesia. Otonomi secara sempit diartikan sebagai "mandiri", sedangkan dalam arti luas adalah "berdaya". Jadi otonomi daerah yang dimaksud adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri dan berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan pemerintah daerahnya sendiri. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah. Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah merupakan suatu instrument politik dan instrument administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi.¹⁶

Sementara dalam hukum nasional Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 bagian (h) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Dengan dasar itu, maka Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berarti usaha-usaha masyarakat Bangka Belitung dalam mewujudkan tujuannya untuk membentuk Provinsi tersendiri, yaitu Bangka Belitung yang berdiri terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Proses perjuangan Bangka Belitung untuk dibentuk menjadi provinsi merupakan sebuah usaha dari masyarakat maupun pemerintah untuk menemukan solusi dari terselenggaranya kesejahteraan dan efektifitas pelayanan publik yang baik. Hal ini terkait dengan pembangunan yang harus dilakukan setelah resmi menjadi sebuah provinsi dengan memaksimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Dalam hal ini, ada aspek pemekaran provinsi, yaitu satuan wilayah administratif pemerintahan di bawah negara atau negara bagian yang dikepalai oleh seorang gubernur. Melalui pemekaran wilayah itu, Provinsi Sumatera Selatan berkembang menjadi Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri dan Provinsi Bangka Belitung. Perjuangan pembentukan itu, berjalan sejak masa 1950-an, tetapi baru dapat terwujud setelah ada UU Otonomi Daerah. Dengan demikian, UU Otonomi

¹⁶Rowland B.F. Pasaribu, "Bab 11 Otonomi Daerah", (rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Download/files/336624/, dikunjungi pada 18 Maret 2018).

¹⁷Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (<http://www.hukumonline.com/>, dikunjungi pada 27 Februari 2018).

Daerah menjadi jembatan bagi terwujudnya keinginan masyarakat Bangka-Belitung mendirikan provinsi tersendiri yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan.

F. Metode Penulisan

Metode penulisan skripsi ini disusun berdasarkan kaidah penulisan penelitian sejarah dengan melalui serangkaian tahapan metode sejarah yakni heuristik (pengumpulan sumber), kritik (pengujian sumber) sintesis, dan historiografi (penulisan karya sejarah).¹⁸

Heuristik adalah salah satu langkah untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah baik sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam skripsi yang berjudul “GELIAT POLITIK DI DAERAH: Perjuangan Masyarakat Kepulauan Bangka dan Belitung Untuk Membentuk Provinsi Terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1956-2002”, sumber-sumber yang digunakan berasal dari beberapa lembaga kearsipan dan perpustakaan seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Pusat Informasi Kompas-Biro Jawa Tengah, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Belitung, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Jogja Library Center, Perpustakaan Universitas Diponegoro serta website resmi Pemerintah Indonesia. Selain sumber primer dan sumber sekunder, penulis juga menelusuri sumber primer lisan yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara. Informan yang di wawancarai merupakan pelaku sejarah yang mengetahui dan mengikuti kejadian pada masa perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung.

Penelusuran sumber di ANRI dilakukan untuk menemukan sumber terkait dengan kebijakan-kebijakan otonomi daerah tahun 1999 dan pembentukan provinsi Bangka Belitung. Kebijakan-kebijakan itu dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden, yaitu UU No, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

¹⁸Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-24.

Daerah, UU No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Provinsi Bangka Belitung dan Keputusan Presiden pembentukan Provinsi Bangka Belitung telah disahkan pada tahun 2000 dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2002.

Pencarian sumber di Pusat Informasi Kompas-Biro Jawa Tengah dilakukan untuk menemukan sumber primer berupa koran-koran lama yang mengulas peristiwa-peristiwa rintisan Bangka Belitung untuk bergerak menjadi provinsi baru tahun 1956, diresmikannya Bangka Belitung menjadi Provinsi pada November 2000 hingga pelantikan Gubernur sementara Provinsi Babel pada Februari 2001. Selain itu, artikel-artikel yang dimuat dalam koran-koran sezaman dan majalah yang terkait peristiwa Bangka Belitung menjadi provinsi juga didapat dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Universitas Diponegoro, dan Jogja Library Center.

Sumber primer lisan diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan orang-orang yang berkompeten. Mereka itu antara lain; Ir. H. Darmansyah Husein, Drs. Arham Armuza, Rustam Effendi, Akhlanudin, A. Rani Rasyid dan Iswarin Yusuf. Hasil wawancara ini digunakan sebagai pelengkap dan sekaligus pembanding sumber tertulis.¹⁹ Hasil wawancara beberapa tokoh yang representatif diseleksi dan dibanding-bandingkan, yang dalam metode sejarah disebut koraborasi, sehingga akan diperoleh data yang objektif. Wawancara yang dilakukan dengan cara itu dengan para informan yang terlibat langsung dengan peristiwa dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa tetapi tidak terlibat langsung didalamnya.

Penulis juga mendapatkan sumber primer berupa salinan surat-surat keputusan, maupun dokumen-dokumen resmi pembentukan provinsi Bangka Belitung dari informan-informan yang diwawancarai. Sumber primer yang didapat itu merupakan bentuk dukungan dan persetujuan akan pembentukan provinsi Bangka Belitung melalui lembaga perwakilan daerah ketiga daerah

¹⁹Hasil wawancara dapat dikategorikan sebagai sumber primer. Lihat Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Univeristas Indonesia Press, 1983). hlm. 35.

(Bangka, Kota Pangkalpinang dan Belitung), organisasi-organisasi/lembagapembentukan provinsi Bangka Belitung, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Republik Indonesia (RI).

Sumber sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku terkait dengan topik permasalahan. Buku-buku tersebut terkait dengan perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung, diantaranya buku karya Ahmadi Sofyan, yang berjudul *Jejak Sang Provokator: Anak Yatim Bermetamorfosa Menjadi Pengusaha, Rekam Jejak Johan Murod (Panglima Rajawali)*, diperoleh dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Belitung. Buku karangan Husnie Effendi dan kawan-kawan dengan judul *Kronika Bangka Belitung (Zaman Menuntut Provinsi)* dan sebuah buku biografi yang ditulis oleh Haril M. Andersen yang berjudul *Utusan Negeri Serumpun; Sebuah Biografi Ir. H. Darmansyah Husein*, kedua buku tersebut diperoleh dari informan-informan yang diwawancarai. Sumber sekunder juga didapat melalui skripsi, tesis dan jurnal terkait dengan Provinsi Bangka Belitung yang diperoleh dari Perpustakaan Universitas Gajah Mada.

Setelah pengumpulan sumber dipandang cukup, tahap berikutnya adalah kritik sumber. Kritik sumber merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk menguji sumber-sumber sejarah yang telah dikumpulkan untuk menyeleksi data, sehingga diperoleh fakta yang kemudian dirangkai menjadi sebuah tulisan. Dalam ilmu sejarah, sumber-sumber tersebut terlebih dahulu dinilai melalui kritik eksteren dan interen.²⁰ Kritik eksteren dilakukan untuk menguji otentisitas atau keaslian sumber. Sedangkan kritik interen merupakan kritik untuk menilai kredibilitas data dalam sumber, apakah isi dalam sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan kritik interen untuk mendapatkan fakta. Beberapa fakta yang didapat melalui kritik interen adalah; pertama, perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung telah dimulai pada tahun 1956. Kedua, perjuangan pembentukan provinsi Bangka Belitung hampir berhasil pada masa

²⁰Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 82-117.

orde baru, tetapi tidak disetujui oleh pemerintah pusat. Ketiga, perjuangan itu kembali terwujud pada masa reformasi.

Tahap ketiga adalah interpretasi sumber yaitu kegiatan analisis dan sintesis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik sumber. Interpretasi sumber dilakukan guna menghubungkan dan merangkaikan fakta sejarah secara kronologis sehingga mendapat alur cerita yang sistematis melalui penafsiran fakta yang sudah diklarifikasi agar dapat diceritakan kembali. Fakta-fakta sejarah yang relevan dengan perjuangan pembentukan Provinsi Bangka Belitung disintesis melalui imajinasi, interpretasi dan teorisasi untuk mencari hubungan antara satu fakta dan fakta lain dalam kerangka hubungan kronologis dan kausalitas. Dengan demikian, fakta-fakta sejarah yang telah didapat melalui pengumpulan sumber-sumber tersebut, mengeksplanasikan bahwa perjuangan Bangka Belitung menjadi provinsi sudah ada sejak tahun 1956 hingga masa reformasi yang didukung dengan lahirnya otonomi daerah.

Tahap terakhir adalah historiografi atau penulisan sejarah, dalam tahap ini penulis merekonstruksi berbagai peristiwa dan usaha yang telah dilakukan mulai dari gagasan untuk membentuk provinsi sendiri dan terlepas dari Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 1956 hingga diresmikannya Provinsi Bangka Belitung tahun 2002, serta adanya upaya masyarakat dan pemerintah bekerjasama untuk membangun wilayah yang berlandaskan kemandirian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang diutamakan.

G. Sistematika Penulisan

Keseluruhan isi skripsi terdiri atas lima Bab. Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II memuat latar belakang politik pemerintahan dan kondisi daerah Bangka Belitung. Bahasan pada bab ini diulas dalam tiga sub bab. Bagian ini penting untuk dibahas sebab latar belakang politik pemerintahan Bangka Belitung itu dapat menggambarkan kondisi sosial politik Bangka Belitung sebelum bergabung menjadi Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu juga dikaji melalui kondisi

geografis, kondisi ekonomi dan sosial budaya Bangka Belitung yang terpisah dan berbeda dengan Provinsi Sumatera Selatan. *Pertama*, latar belakang politik pemerintahan Bangka Belitung sejak bergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. *Kedua*, kondisi geografis, demografis, wilayah administrasi dan ekonomi. *Ketiga*, kondisi sosio-kultural masyarakat Bangka Belitung sebelum menjadi provinsi.

Bab III membahas Perjuangan Masyarakat Bangka Belitung untuk Menjadikan wilayahnya sebagai Provinsi dari tahun 1966-1970. Bagian ini penting untuk dibahas guna menggambarkan bentuk-bentuk perjuangan Bangka Belitung menjadi provinsi melalui jalur lembaga perwakilan daerah Bangka, Belitung dan kota pangkalpinang. Bahasan ini terdiri dari dua bab. *Pertama*, *Background* Historis Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung. *Kedua*, Jejak Perjuangan Tahun 1956-1998.

Bab IV mengkaji hubungan otonomi daerah dengan pembentukan provinsi Bangka Belitung di era reformasi. Bagian ini penting untuk dibahas sebab menjelaskan hubungan antara pelaksanaan otonomi daerah pada masa reformasi dengan kelanjutan perjuangan provinsi Bangka Belitung di era reformasi. Bahasan ini terdiri dari empat sub bab. *Pertama*, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999. *Kedua*, Persiapan Pembentukan Bangka Belitung Menjadi Provinsi. *Ketiga*, Bangka Belitung Menjadi Provinsi. *Keempat*, Pembentukan Struktur Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bab V adalah simpulan yang berisi jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam skripsi dan telah dibahas secara kritis pada bab-bab sebelumnya.